

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

SEMINAR HASIL PENELITIAN



PALEMBANG
7 SEPTEMBER 2016

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pos 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581



PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA PERIODE SEMESTER GENAP 2015-2016



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
7 September 2016**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma**

Palembang 2016

PROSIDING
SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA
PERIODE SEMESTER GENAP 2015-2016

© Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

Cetakan Pertama Tahun 2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reviewer

Dr. Koesharijadi, S.E., M.M
Dr. Kristina Setyastuti, M.M.
Sulaiman Helmi, S.E., MM
Verawaty, S.E., Ak., M.Sc
Cirtra Indah M, S.E., Ak., M.M.
Asmanita, S.E., M.Si

Editor

M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si
Irwan Septayuda, S.E., M.Si

Penerbit



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
<http://fekon.binadarma.ac.id>

ISBN : 978-602-74335-1-9

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas kemudahan yang diberikan-NYA maka Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Periode Semester Genap 2015-2016 pada tanggal 7 September 2016 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tinggi dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar hasil penelitian.

Prosiding ini berisi makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang kompleks dan menuntut peran aktif seluruh pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan yang telah menghadiri pembukaan dan memberikan sambutan pada seminar ini dan para peserta seminar atas keikutsertaannya. Selanjutnya penghargaan juga patut diberikan kepada para presenter, editor, dan seluruh panitia pelaksana serta pihak-pihak terkait dalam seminar hasil penelitian ini atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan konsep dan aplikasi yang bermanfaat. Aamiin.

Palembang, September 2016

Tim Pelaksana

PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DPTPH PEMROV SUMSEL	
Ria Tri Septiani, Verawaty, Ade Kemala Jaya	130
AKUNTANSI SEBAGAI MITOS PENILAI KINERJA	
Rizki Ramadhan Sagala, Siti Nurhayati Nafsiah, Titan Terzaghi	139
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SUMBER DAYA SEWATAMA	
Nanda Satria, Heriyanto, Andrian Noviardy	148
ANALISIS INFORMASI AKUNTANSI DIFERENSIAL TERHADAP PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PESANAN KHUSUS DALAM MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN (Studi kasus PT. Megah Asri Busana Internasional Bandung)	
Eryantinto Prasetyo, Siti Nurhayati Nafsiah, Andrian Noviardy	158
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PPN (KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU)	
Abdullah Hafiz, Hasan Kuzery, Titan Terzaghi	170
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASIMETRI INFORMASI	
Maulidia Permatasari, M. Titan Terzaghi, Poppy Indriani	176
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA LINGKUNGAN (Pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI)	
Siti Nurhayati Nafsiah, Rolia Wahasusmiah, Prestiana Ambarwati	184
PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN AKI GS ASTRA PADA SHOP & DRIVE ASTRA OTOPARTS	
R.M. Alfian Dwi Yansyah, Wiwin Agustian, Andrian Noviardy	200
ANALISIS ANGGARAN BIAYA PROYEK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN YANG EFEKTIF PADA PT. SERASAN JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
Gufron Maskhuri, Siti Nurhayati Nafsiah, Citra Indah Merina	213
PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN	
Verawaty, Septiani Fransisca, Richa Rahmawati	224
ANALISIS FINANCIAL DISTRESS MENGGUNAKAN METODE ZMIJEWSKI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BEI	
Jemy Saputra, Poppy Indriani, Andrian Noviardy	234
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	
Rizky Kurniawan, Hasan Kuzery, Rolia Wahasusmiah	244
PENGARUH AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)	

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rizky Kurniawan¹, Hasan Kuzery², Rolia Wahasusmiyah³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang

Jalan Jend Ahmad Yani No.12, Seberang 1 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-MAIL: Krizky123@yahoo.com 1 : hasan-kuzery@binadarma.ac.id 2;

rolia.wahasusmiyah@binadarma.ac.id 3

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of the motor vehicle tax revenue and motor vehicle title transfer fee from the years 2011-2015 to tax revenues dispenda vehicles in the province of South Sumatra. The techniques used for data collection and document interview. And analysis techniques used in the data that is quantitative descry can be said to be very descriptive. The results showed that based on the results of the calculation of the overall effectiveness of the tax revenue of motor vehicles and motor vehicle title transfer fee can be said to be very edektif, with the average fot motor vehicle taxes amounted to 100,06% and motor vehicle title transfer fee amounted to 94,88%. To contribute tax revenues motor vehicle title transfer fee to taxes revenues motor vehicle and motor revenues of the years 2011-2015 by an avurege of 34,39% and for the transfer tax motor vehicle amounted to 38,50% with the criteria of contributing tax revenue area.

Keywords : Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Transfer duties, Local Taxes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan pajak kendaraan pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis digunakan dalam pengolahan data yaitu kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dikatakan sangat edektif, dengan rata-rata untuk pajak kendaraan bermotor sebesar 100,06% dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 94,88%. Untuk kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah provinsi sumatera selatan selama tahun 2011-2015 secara rata-rata sebesar 34,39% dan untuk bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 38,50% dengan kriteria berkontribusi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan atas pembayaran tersebut, hasilnya digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang KUP). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut revisi undang-undang no 33 Tahun 2004 membawa dampak terhadap reformasi di bidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pemungutan pajak, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan, dan Sektor Pertambangan, dan Bea Materai. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi di dalamnya seperti : kurangnya pengawasan yang terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, rendahnya daya beli masyarakat terhadap sepeda motor baru maupun bekas dan ditunjang dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor membuat penerimaan pajak dari sektor ini menjadi berkurang.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor haruslah diimbangi dengan proses pemungutan. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan efektif apabila realisasi melampaui target 90% dari yang telah ditetapkan, begitu juga dengan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan apabila realisasi melampaui target 50% dapat dikatakan baik dalam penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh data realisasi penerimaan pajak daerah di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

No.	Tahun	Penerimaan PKB	Penerimaan BBN-KB
1	2011	506.202.999.902	781.649.668.321
2	2012	594.902.405.646	783.808.370.196
3	2013	663.422.958.598	784.501.493.444
4	2014	749.169.627.264	784.501.493.444
5	2015	785.782.252.496	596.462.294.191

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi pajak yang besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena selalu meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai obyek pajak, berguna untuk membina penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, membantu peningkatan pendapatan kota/kabupaten, meningkatkan ketenaguan dan kepastian hukum bagi wajib pajak di Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea**

Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Mengetahui Efektivitas Dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan penulis langsung dari Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, dan data-data hasil wawancara mengenai target anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan cara membaca literatur - literatur yang ada hubungannya dalam penelitian ini data sekunder berupa sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Wewenang di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan data yang digunakan berupa data angka sehingga memberikan keterangan yang lengkap untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Dokumentasi (*documentation*) Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Analisis Data

Untuk mengukur Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB dari target dapat digunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Efektivitas merupakan perbandingan antara target pajak kendaraan

bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Rumus Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PHE dan EBN-KE}}{\text{Target Penerimaan PHE dan EBN-KE}} \times 100\%$$

- Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil, jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total penerimaan pajak daerah.

Rumus

Kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPD dan DDI-SD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kriteria Persentase Efektivitas

Persentase	Keterangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90,01% - 100%	Efektif
80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60,00%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri dalam (Falis :

2011).

Tabel 3.3

Kriteria Persentase Kontribusi

Persentase	Keterangan
0% - 10%	Tidak Berkontribusi
10,10% - 20%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

(Handoko:2013)

3. Pembahasan dan Analisis

3.1 Gambaran Umum Dinas pendapatan Daerah Sumatera Selatan

Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan itu untuk memunjang usaha-usaha pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan No. PD/93/1970 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Daerah yang pada mulanya hanya diurus dan dilaksanakan oleh salah satu bagian di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

Perkembangan pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya diikuti oleh pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut, maka berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1973/1974 tanggal 14 Juli 1973 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 6 Mei 1970 No. PD/93/1970 sebelum adanya peraturan daerah tentang penetapan dan

pemungutan pajak dan pendapatan daerah hanya diurus oleh satu bagian dari biro keuangan dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1972 No. 91.B/I/16 tentang Pembentukan Dinas pajak dan Pendapatan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 9/PERDASS/1973/1974 dibentuk Dinas Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Analisis

3.2.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan

Tabel 4.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan

Tahun	TARGET (Rp.)	Realisasi (Rp.)	persentase (%)	Kriteria
2011	189.312.713.000	202.999.002	107,23%	Sangat Efektif
2012	277.394.808.000	294.802.000.000	106,28%	Sangat Efektif
2013	263.092.708.000	232.422.938.000	88,35%	Efektif
2014	302.092.000.000	108.009.027.000	35,75%	Efektif
2015	770.278.000.000	782.182.182.000	101,55%	Sangat Efektif
Rata-Rata			100,00%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata dari tahun

2011 sampai dengan 2015 rata-rata sebesar 100,06% jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya Sangat Efektif dikarenakan diatas 100% dari kriteria presentase efektifitas

3.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan

Tabel 4.3
Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan

Tahun	TARGET (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Kriteria
2011	404.777.000.000	791.649.808.321	195,58%	Sangat Efektif
2012	523.799.000.000	771.908.778.196	147,36%	Sangat Efektif
2013	670.496.708.000	764.391.093.000	113,99%	Cukup Efektif
2014	870.282.000.000	766.391.093.000	88,05%	Cukup Efektif
2015	700.000.000.000	396.462.200.191	56,49%	Cukup Efektif
Rata-Rata			116,09%	Efektif

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor rata-rata dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 94,88% jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya Efektif dikarenakan dibawah 100% dari kriteria presentase efektifitas.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bea

balik nama kendaraan bermotor dapat dikatakan efektif dari tahun 2011-2015.

3.2.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4.4
**Kontribusi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor
Sumatera Selatan**

Tahun	Realisasi PDB	Realisasi PD	Persentase (%)	Ketertarikan
2011	108.202.899.882	1.019.935.880.709	10,59 %	Berkontribusi
2012	101.892.409.840	1.019.127.812.818	10,00 %	Berkontribusi
2013	103.122.828.088	1.016.734.383.831	10,14 %	Berkontribusi
2014	149.189.817.181	1.017.097.384.309	14,68 %	Berkontribusi
2015	185.782.225.082	1.017.816.378.813	18,26 %	Berkontribusi
Rata-Rata			12,57 %	Berkontribusi

Berdasarkan tabel 4.4

menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan rata-rata dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 12,57 %. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya berkontribusi dikarenakan diatas dari 10% pada presentase kontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan.

3.2.4 Analisis Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 4.5

Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PD	Persentase	Ketertarikan
2011	181.409.408.121	1.009.935.880.709	17,91 %	Sangat Berkontribusi
2012	171.886.378.190	1.009.127.812.818	16,93 %	Sangat Berkontribusi
2013	174.351.493.444	1.001.714.383.831	17,35 %	Berkontribusi
2014	184.351.493.444	1.007.097.384.309	18,29 %	Berkontribusi
2015	280.447.294.191	1.007.816.378.813	27,77 %	Sangat Berkontribusi
Rata-Rata			17,67 %	Berkontribusi

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa kontribusi Bea Balik Nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan rata-rata dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 17,50 %. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan sudah cukup baik melihat potensi kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 4.2 memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Sumatera Selatan

adalah sebagai berikut: di tahun 2011 target pajak kendaraan bermotor sebesar 489.243.745.000, tahun 2012 target pajak kendaraan bermotor sebesar 577.307.600.000, tahun 2013 target pajak kendaraan bermotor sebesar 663.903.700.000, tahun 2014 target pajak kendaraan bermotor sebesar 812.902.152.598 dan tahun 2015 target pajak kendaraan bermotor sebesar 775.275.400.742 sedangkan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2011 sebesar 508.202.999.902, tahun 2012 sebesar 594.502.405.046, tahun 2013 sebesar 663.422.958.598, tahun 2014 sebesar 749.169.627.264, dan tahun 2015 sebesar 785.782.252.496. Maka tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2011} = \frac{Rp\ 508.202.999.902}{Rp\ 489.243.745.000} \times 100\%$$

$$= 103,88 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2012} = \frac{Rp\ 594.502.405.046}{Rp\ 577.307.600.000} \times 100\%$$

$$= 102,98 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2013} = \frac{Rp\ 663.422.958.598}{Rp\ 663.903.700.000} \times 100\%$$

$$= 99,93 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2014} = \frac{Rp\ 749.169.627.264}{Rp\ 812.902.152.598} \times 100\%$$

$$= 92,16 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2015} = \frac{Rp\ 785.782.252.496}{Rp\ 775.275.400.742} \times 100\%$$

$$= 101,36 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dilakukan analisis dimana pada tahun 2011 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 103,88% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 102,98 % dengan kriteria sangat efektif, namun pada tahun 2013 dan 2014 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 99,93% dan 92,16 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan terlalu tingginya target yang ditetapkan pemerintah sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 101,36% dengan kriteria sangat efektif

3.3.2 Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan bea balik nama

kendaraan bermotor terhadap target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: di tahun 2011 target bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 614.757.600.000, tahun 2012 target bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 743.709.100.000, tahun 2013 target bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 870.496.700.000, tahun 2014 target bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 870.285.507.745 dan tahun 2015 target bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 710.000.000.000 sedangkan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 sebesar 781.649.668.321, tahun 2012 sebesar 753.808.370.196, tahun 2013 sebesar 704.501.493.444, tahun 2014 sebesar 704.501.493.444, dan tahun 2015 sebesar 596.462.294.191. Maka tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2011} = \frac{Rp\ 781.649.668.321}{Rp\ 614.757.600.000} \times 100\%$$

$$= 127,15 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2012} = \frac{Rp\ 753.808.370.196}{Rp\ 743.709.100.000} \times 100\%$$

$$= 101,36 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2013} =$$

$$\frac{Rp\ 704.501.493.444}{Rp\ 870.496.700.000} \times 100\%$$

$$= 80,93 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2014} =$$

$$\frac{Rp\ 704.501.493.444}{Rp\ 870.285.507.745} \times 100\%$$

$$= 80,95 \%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Tahun 2015} =$$

$$\frac{Rp\ 596.462.294.191}{Rp\ 710.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 84,01 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dilakukan analisis dan pembahasan yaitu pada tahun 2011 tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 127,15% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2012 tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 101,36 % dengan kriteria sangat efektif, namun dari tahun 2013, 2014, dan tahun 2015 tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya dengan kriteria cukup efektif. Penyebab tidak tercapainya target tahun 2013-2015 adalah daya beli masyarakat yang lemah, banyaknya kendaraan bermotor yang daluarsa atau rusak, harga jual kendaraan bermotor yang semakin menurun dari tahun ke tahun, kurang pahami masyarakat mengetahui tata cara dalam proses bea balik nama.

3.3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa tingkat kontribusi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 sebesar 508.202.999.902, tahun 2012 sebesar 594.502.405.046, tahun 2013 sebesar 663.422.958.598, tahun 2014 sebesar 749.169.627.264, dan pada tahun 2015 sebesar 789.782.252.496, sedangkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 sebesar Rp. 1.369.935.856.700, tahun 2012 sebesar Rp. 1.849.119.912.016, tahun 2013 sebesar Rp. 2.001.714.583.551, tahun 2014 sebesar Rp. 2.027.037.384.205, dan tahun 2015 sebesar Rp. 2.407.918.390.923.

$$\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2011} = \frac{508.202.999.902}{1.369.935.856.700} \times 100 \% = 37,09 \%$$

$$\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2012} = \frac{594.502.405.046}{1.849.119.912.016} \times 100 \% =$$

$$32,15 \%$$

$$\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2013} = \frac{663.422.958.598}{2.001.714.583.551} \times 100 \% =$$

$$33,14 \%$$

$$\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2014} = \frac{749.169.627.264}{2.027.037.384.205} \times 100 \%$$

$$= 36,96 \%$$

$$\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2015} = \frac{789.782.252.496}{2.407.918.390.923} \times 100 \%$$

$$= 32,63 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di tahun 2011 sebesar 37,09 %, tahun 2012 sebesar 32,15%, tahun 2013 sebesar 33,14%, tahun 2014 sebesar 36,96% dan ditahun 2015 sebesar 32,63%. Berdasarkan dari tahun 2011-2015 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah sebesar 34,39 % hal ini menunjukkan kriteria berkontribusi seluruhnya.

3.3.4 Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa tingkat kontribusi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 sebesar 781.649.668.321, tahun 2012 sebesar 753.808.370.196, tahun 2013 sebesar 704.501.493.444, tahun 2014 sebesar 704.501.493.444, dan pada tahun 2015 sebesar 596.462.294.191, sedangkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 sebesar Rp. 1.369.935.856.700, tahun 2012 sebesar

Rp. 1.849.119.912.016, tahun 2013 sebesar Rp. 2.001.714.583.551, tahun 2014 sebesar Rp. 2.027.037.384.205, dan tahun 2015 sebesar Rp. 2.407.918.390.923.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2011} &= \frac{781.649.668.321}{1.369.935.856.700} \times 100 \% \\ &= 57,05 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2012} &= \frac{753.808.370.196}{1.849.119.912.016} \times 100 \% \\ &= \end{aligned}$$

40,76 %

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2013} &= \frac{704.501.493.444}{2.001.714.583.551} \times 100 \% \\ &= \end{aligned}$$

35,19 %

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2014} &= \frac{704.501.493.444}{2.027.037.384.205} \times 100 \% \\ &= \end{aligned}$$

34,75 %

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kontribusi Tahun 2015} &= \frac{596.462.294.191}{2.407.918.390.923} \times 100 \% \\ &= \end{aligned}$$

24,77 %

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dilakukan analisis pembahasan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di tahun 2011 sebesar 57,65 % tahun 2012 sebesar 40,76 %, kedua tahun tersebut sangat berkontribusi dan tahun 2013 sebesar 35,19 %,dan tahun 2014 sebesar 34,75 % kedua tahun tersebut berkontribusi ditahun 2015 sebesar 24,77 % cukup berkontribusi. Menurunnya kontribusi

disebabkan realisasi penerimaan minim dari target sebelumnya karena ekonomi masyarakat menurun misalnya komoditas ekspor menurun.

3.3.5 Upaya Yang Dilakukan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan terhadap menurunnya penerimaan pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

1. Melakukan penyuluhan dengan menghimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak terhutang.
2. Melakukan ekstentifikasi pada kantor-kantor samsat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan samsat-samsat pembantu. Hal ini dapat memudahkan para wajib pajak yang bertempat tinggal di daerah-daerah pelosok Provinsi Sumatera Selatan.
3. Melakukan peningkatan kemampuan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai-

pegawai samsat dalam pelatihan kerja sehingga mereka lebih kompeten dalam melayani para wajib pajak.

4. Mempermudah proses pembayaran pajak contohnya yaitu adanya SAMSAT keliling, membayar pajak melalui via ATM
5. Melakukan pemutihan setiap tahunnya demi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Target dan realisasi dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan pada pajak kendaraan bermotor dan begitu juga pada bea balik nama kendaraan bermotor di sumatera selatan.
2. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi

Sumatera Selatan secara keseluruhan Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan daerah Sumatera Selatan dinilai berhasil dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan efektif. Ini juga menunjukkan nilai positif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan berkontribusi, untuk kontribusi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan juga berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan cukup serius mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Untuk setiap tahunnya bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011-2015 sangat efektif, dan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 menjadi menurun yaitu cukup efektif. Penyebab dari menurunnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah banyaknya kendaraan bermotor yang rusak, harga jual kendaraan bermotor menurun
5. Menurunnya kontribusi pajak bea balik nama dari sangat berkontribusi pada tahun 2011 dan 2012 menjadi berkontribusi, pada tahun 2013 dan 2014 menurun lagi menjadi cukup berkontribusi. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi masyarakat menurun dimana harga komoditi ekspor yang menurun
6. Upaya yang dilakukan Dinas Provinsi Sumatera Selatan
 - a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi membayar pajak yang terhutang
 - b. melakukan peningkatan kemampuan pajak kendaraan bermotor dan bea

balik nama bermotor kepada seluruh petugas Dinas sehingga lebih kompeten dalam melayani wajib pajak.

- c. Melakukan pemutihan pada kendaraan yang telah telat membayar pajak dalam waktu yang lama.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Diharapkan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar tetap meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor setiap tahunnya.
2. Diharapkan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mengenakan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah terutama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga penerimaan tersebut menjadi meningkat
3. Diharapkan kepada kepala dinas pendapatan dapat membuka cabang-cabang terpadu di

- berbagai daerah yang sulit dijangkau
4. Memberikan kebebasan denda terhadap kendaraan yang belum bayar pajakkendaraan bermotor pada waktu yang lama
 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor haruslah realistis untuk dapat dicapai memperhatikan pencapaian target tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan penerimaan pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmat, Fatoni. 2003. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rikneka Cipta.
- Fauziah, Luluk. 2015. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Palembang: Universitas PGRI.
- Guritmo T. 1997. *Kamus Bisnis Ekonomi Perbankan Inggris - Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah*.
- Kemendagri Nomor 25 Tahun 2010. *Tentang Dasar PKB dan BBN-KB*. Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Restribusi*.
- Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Provinsi*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuang*.

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah
Selatan Palembang, Universitas
Bina Darma.
- Pandriangan. 2014. *Hukum Pajak*.
Yogyakarta. Graha Ilm.
- Perpajakan. Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 28
tahun 2009 tentang *Pajak
Daerah dan Restribusi
Daerah*.
- Purnama, Indah Sari. 2013. *Pengaruh
Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Penerimaan
Pajak Bermotor Pada Dinas
Provinsi Sumatera Selatan*.
Palembang, Universitas Bina
Darma.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
*Tentang Pendoma Pengelolaan
Keuangan*.
- Rinusa dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan
Praktis Mengontrol APBD*.
Edisi Revisi. Jakarta. FES
- Republik Indonesia Peraturan
Pemerintahan Nomor 13 Tahun
2006 tentang *pendoma
pengelolaan keuangan*.
- Suci, Triayu. 2015. *Analisi Efektivitas
dan Kontribusi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Penerimaan Pajak
Daerah Pada DinasPendapatan
Daerah Provnisi Sumatera*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D*. Bandung.
Alfabeta.
- Syukur, Ferdika, Fitri Raharjo, dan
Wardi, 2014. *Himpunan
Lengkap Undang-Undang
Tentang Pemerintahan Daerah*.
Jogjakarta. Saufa.
- Siahaan, Mariot Pahala. 2010. *Pajak
Daerah Dan Retribusi*. Jakarta.
PT. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Manajemen
Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
Bumi Aksara.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*
Edisi 11 Buku 1. Jakarta.
Salemba Empat.